



TESIS

Judul:

Penerapan Pelayanan Seksual Sebagai Gratifikasi Pada
Pengadilan Singapura (Studi Banding Dengan Hukum
Positif di Indonesia)

Disusun oleh:

STEPHANIE CHRISTY
NIM. 217231011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENERAPAN PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI
GRATIFIKASI PADA PENGADILAN SINGAPURA
(STUDI BANDING DENGAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:
STEPHANIE CHRISTY
NIM. 217231011

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : STEPHANIE CHRISTY
NIM : 217231011
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Penerapan Pelayanan Seksual Sebagai Gratifikasi Pada
Pengadilan Singapura (Studi Banding Dengan Hukum
Positif di Indonesia)
Title : The Application of Sexual Services as Gratification in
Singapore Courts (A Comparative Study with Positive Law
in Indonesia)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER
KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-
Januari-2025.

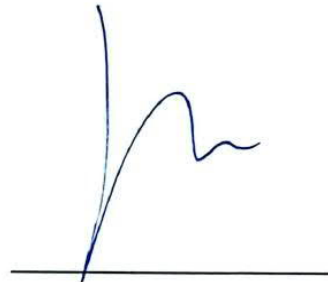
Tim Penguji:

1. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. IRAWAN SOERODJO, PRof. Dr. S.H., S.N., M.Si.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.

ABSTRAK

- (A) Nama : Stephanie Christy (NIM: 217231011)
- (B) Judul Tesis : Penerapan Pelayanan Seksual Sebagai Gratifikasi Pada Pengadilan Singapura (Studi Banding Dengan Hukum Positif di Indonesia)
- (C) Kata Kunci : Korupsi, Gratifikasi Seksual, Hukum Indonesia, *Prevention of Corruption Act*, Singapura.
- (D) Isi :

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkategorikan pelayanan seksual di Singapura yang dapat diadopsi Indonesia dalam hukum positif di Indonesia dan menjabarkan pembuktian dan pemberian sanksi hukum pelaku gratifikasi pelayanan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi dokumen, dan studi kasus, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan analisis hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara Singapura telah mengatur pelayanan seksual sebagai gratifikasi seksual melalui *Prevention Of Corruption Act* (PCA) dengan menjabarkan bahwa pelayanan seksual termasuk dalam bentuk jasa sehingga pelayanan seksual dalam bentuk nyata ataupun tidak, bisa dikategorikan sebagai gratifikasi seksual. Pembuktian dan sanksi gratifikasi seksual bisa merujuk pada Hukum Islam dalam kategori perzinahan, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (E) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
- (F) Peneliti : Stephanie Christy

ABSTRACT

- (A) Name : Stephanie Christy (NIM: 217231011)
- (B) Thesis Title : Application of Sexual Services as Gratification in Singapore Courts (Comparative Study with Positive Law in Indonesia)
- (C) Keywords : Corruption, Sexual Gratification, Indonesian Law, Prevention of Corruption Act, Singapore.
- (D) Content :

The purpose of this research is to categorize sexual services in Singapore that can be adopted by Indonesia in positive law in Indonesia and describe the proof and legal sanctions for perpetrators of sexual service gratuities in Indonesia. This research uses a normative method (legal research) by using a statute approach, using primary data types and secondary data with data collection techniques, namely interviews, document studies, and case studies, and using data collection techniques with legal analysis. The results showed that Singapore has regulated sexual services as sexual gratification through the Prevention Of Corruption Act (PCA) by explaining that sexual services are included in the form of services so that sexual services in real or not, can be categorized as sexual gratification. Proof and sanctions of sexual gratification can refer to Islamic Law in the category of adultery, Criminal Law (KUHP), especially Article 184 paragraph (1) and Article 26A B of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

- (E) Supervisor : Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
- (F) Researcher : Stephanie Christy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENERAPAN PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN SINGAPURA (STUDI BANDING DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)”** ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, bantuan, dukungan, bimbingan, masukan atau saran dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Dr. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.M., M.Hum., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, masukan, kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Seminar Proposal Tesis sekaligus Wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang

telah memberikan masukan dan saran yang berguna untuk penyempurnaan tesis ini;

7. Ibu Dela, selaku Staf Sekretariat lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah kasih membagi ilmunya kepada penulis selama menempuh studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Orang tua penulis yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis, memanjatkan doa, dan memberikan dukungan yang luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kedua kakak penulis, Vicky dan Lucky, dan adik penulis, Vanessa yang memberikan banyak kasih sayang, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis.
11. Bapak Bernard Moses Saragih, Bapak Aulia Nugraha Sutra Ashary, dan Bapak Idris Wasahua, yang telah menyediakan waktu, pikiran, tenaga serta dukungannya dengan bersedia diwawancarai oleh penulis sebagai narasumber;
12. Kak Hotma, Kak Winarsih, Kak Magdalena, Jesica, Mayday, Jihan, dan Rilda, selaku teman-teman angkatan yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
13. Kak Winarsih, Kak Josie, Yuflih, Dita, dan Mas Nurul, selaku teman satu bimbingan lainnya yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini;
14. Tri Handayani, Ovy, Kak Gilang, yang tidak berhenti menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyampaikan doa baik untuk semua orang yang turut membantu dalam proses pengerjaan tesis ini. Penulis minta maaf jika ada salah kata atau kesalahan penulisan yang tidak disengaja. Besar harapan penulis tesis ini bisa bermanfaat untuk semua orang yang membacanya.

Jakarta, 30 Desember 2024

Penulis

Stephanie Christy

Pernyataan

Nama : STEPHANIE CHRISTY
NIM : 217231011
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Penerapan Pelayanan Seksual Sebagai Gratifikasi Pada
Pengadilan Singapura (Studi Banding Dengan Hukum
Positif di Indonesia)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024
Yang menyatakan



STEPHANIE CHRISTY
NIM. 217231011

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	33
F. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Penelitian Terdahulu.....	39
B. Teori Gratifikasi.....	40
C. Teori Korupsi.....	51
D. Teori Penyalahgunaan Kekuasaan.....	82
E. Teori Means-End Scheme.....	87
F. Teori Kepatuhan.....	88
G. Teori Kepatutan.....	89
H. Teori Tata Kelola Pemerintahan.....	90
I. Teori Kode Etik.....	96

BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....103

- A. Posisi Kasus.....103
- B. Putusan Pengadilan Distrik.....104
- C. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura (*High Court Of Singapore*
[2024] Banding Hakim SGHC 66 Nomor 9185 Tahun
2023.....105
- D. Posisi Kasus Putusan 87/PID.SUS/TPK/2013/PN/BDG.....111
- E. Dakwaan Penuntut Umum.....113
- F. Putusan Pengadilan.....114
- G. Narasumber Dari Praktisi.....116
- H. Narasumber Dari Akademisi.....121

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....125

- A. Pelayanan Seksual Yang Masuk Dalam Kategori Di Singapura Dapat
Juga Diadopsi Indonesia Dalam Hukum Positif Di
Indonesia.....125
- B. Pembuktian Dan Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Pelaku
Gratifikasi Pelayanan Seksual di Indonesia.....142

BAB V PENUTUP.....161

- A. Kesimpulan.....161
- B. Saran.....162

DAFTAR PUSTAKA.....163

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

UU Tipikor	: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU PTPK	: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
SGHC	: <i>Singapore High Court</i>
PCA	: <i>Prevention Of Corruption Act</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
SCDF	: <i>Singapore Civil Defence Force</i>
OTT	: Operasi Tangkap Tangan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keputusan Dekan

Lampiran 3: Rekap Bimbingan

Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 5: Hasil Turnitin Tesis

Lampiran 6: Surat Keterangan Turnitin Jurnal

Lampiran 7: *Letter Of Acceptance* (LOA)

Lampiran 8: Jurnal Halaman Pertama

Lampiran 9: Surat Permohonan Wawancara dan Foto Wawancara

Lampiran 10: Putusan Pengadilan Tinggi Singapura (*High Court of Singapore*)

[2024] Banding Hakim SGHC 66 Nomor 9185 Tahun 2023